

ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH AJATAPPARENG

Suryani

Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar

Email : Suryani.darwis.sd@gmail.com

ABSTRAK

Suryani, Basri Bado dan Syamsu Alam (2020). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah AJATAPPARENG. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis tingkat kemampuan dan kemandirian keuangan daerah AJATAPPARENG tahun 2012-2017. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu analisis rasio derajat desentralisasi fiskal (kemampuan keuangan daerah), analisis rasio kemandirian keuangan daerah, analisis rasio peranan (*share*) dan analisis rasio pertumbuhan (*growth*).

Hasil penelitian menunjukkan analisis kemampuan keuangan daerah AJATAPPARENG pada tahun 2012-2017 dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal berada pada rata-rata nilai rasio 8,0 % yang menunjukkan pada kategori sangat kurang. Sedangkan analisis kemandirian keuangan daerah AJATAPPARENG pada tahun 2012-2017 dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah berada pada rata-rata nilai rasio 11,20 % dengan kategori instruktif. Adapun hasil analisis rasio peranan (*Share*) sebesar 8,07 % dan hasil analisis rasio pertumbuhan (*growth*) sebesar 29,68 % menunjukkan bahwa nilai *share* tergolong rendah sedangkan nilai *growth* tergolong tinggi. Sedangkan dengan menggunakan peta analisis kemampuan keuangan daerah menggunakan metode kuadran, menunjukkan bahwa masing-masing daerah tersebut berada pada posisi kuadran II yang menunjukkan sumbangan (*share*) PAD terhadap APBD masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Peranan, Rasio Pertumbuhan

PENDAHULUAN

Pergantian sistem politik, sosial, serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi menimbulkan tuntutan agar pengelolaan pemerintah dapat berjalan dengan baik (*good governance*). Salah satu agenda reformasi tersebut yaitu adanya desentralisasi keuangan. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sangatlah penting dan harus memperhatikan keadilan politik dan keadilan ekonomi.

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri (Nadir, 2013). Salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah melalui desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah suatu cara yang dilakukan oleh setiap Negara dalam mengatur sektor publik yang

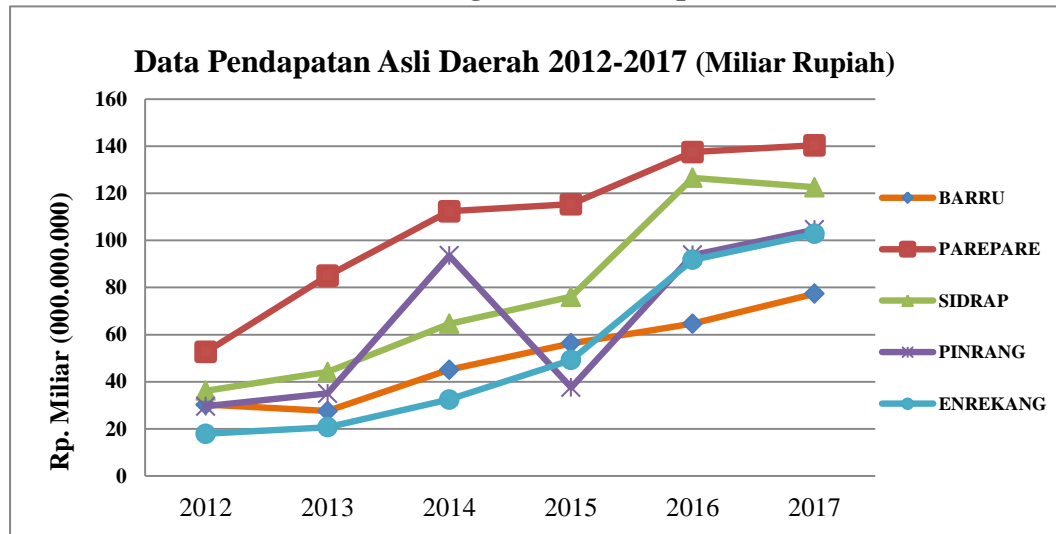
dalam hal ini selalu mencerminkan sejarah, geografi, keseimbangan politik tujuan kebijakan dan karakteristik lain yang berbeda tajam antara satu Negara dengan Negara lainnya (Bird dan Vallaincourt dalam Karianga, 2013). Desentralisasi fiskal memberikan wewenang pada kepala daerah sebagai pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, tetapi tetap juga tidak menjamin terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang adil dan tertib. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan yang mendasar pada sistem pemerintahan yang ada. Salah satu perubahan yang mendasar tersebut ialah penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan otonomi, daerah dituntut mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, masing-masing Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas untuk berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan tersebut. sumber keuangan merupakan salah satu landasan Pemerintah Daerah dalam mengatur hal tersebut. Maka dari itu, hal itu dapat menjadi masalah penting karena tidak ada kegiatan Pemerintah Daerah yang tidak membutuhkan biaya, dan juga sumber keuangan ini dapat menjadi faktor didalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Maksud dalam kemampuan daerah ini adalah untuk melihat sampai sejauh mana setiap Pemerintah Daerah dapat menelaah sumber-sumber keuangan untuk membiayai kebutuhannya secara mandiri tanpa selalu bergantung pada bantuan dan subsidi dari Pemerintah Pusat.

Pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pemerintah pusat. Indikator kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja PAD. Sedangkan indikator kemandirian keuangan suatu daerah diukur dari rasio PAD terhadap dana perimbangan dan pinjaman, dengan demikian PAD dan dana perimbangan merupakan sumber pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah suatu daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Besar kecilnya penerimaan PAD seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Pajak dan Retribusi daerah (yang merupakan komponen penyumbang PAD terbesar) seyogyanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah (Kuncoro dalam Savitry, 2011).

PAD, DAU, dan DAK merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah daerah. Peningkatan PAD selalu diupayakan, apalagi jika hal tersebut berhubungan dengan pelaksanaan otonomi dikarenakan peningkatan PAD tersebut merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah agar berdampak pada perekonomian daerah (Maryati dan Endrawati dalam Suandi, 2016). Pendapatan asli daerah pada dasarnya diukur dengan target PAD kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran. Untuk mengetahui perkembangan dari pendapatan asli daerah tersebut dapat diamati dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

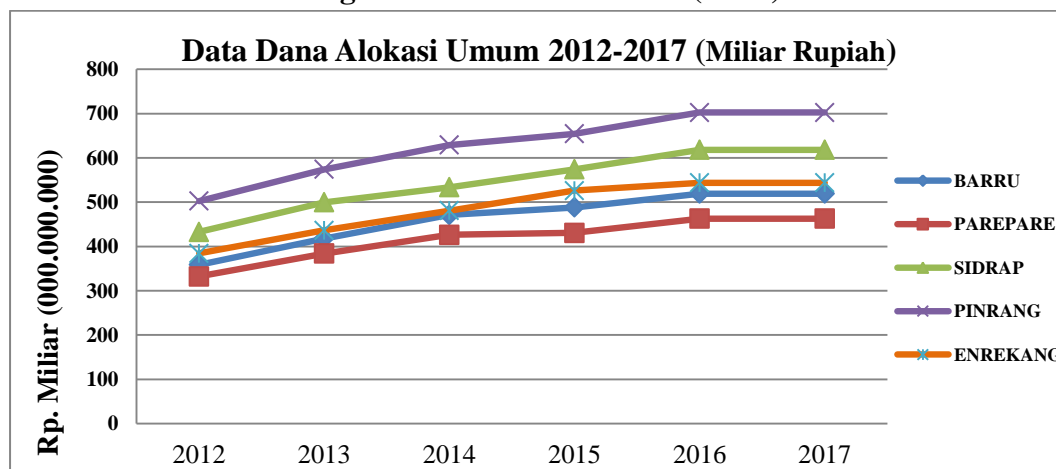


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan 2018

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah secara umum, rata-rata mengalami peningkatan disetiap daerah pada tahun 2012-2017. Hanya Kabupaten Pinrang yang telah mengalami fluktuasi pada tahun 2013 hingga tahun 2016. Dan juga terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2013 dan tahun 2015 di daerah tersebut.

Untuk melihat perkembangan transfer dana alokasi umum dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.2 Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU)

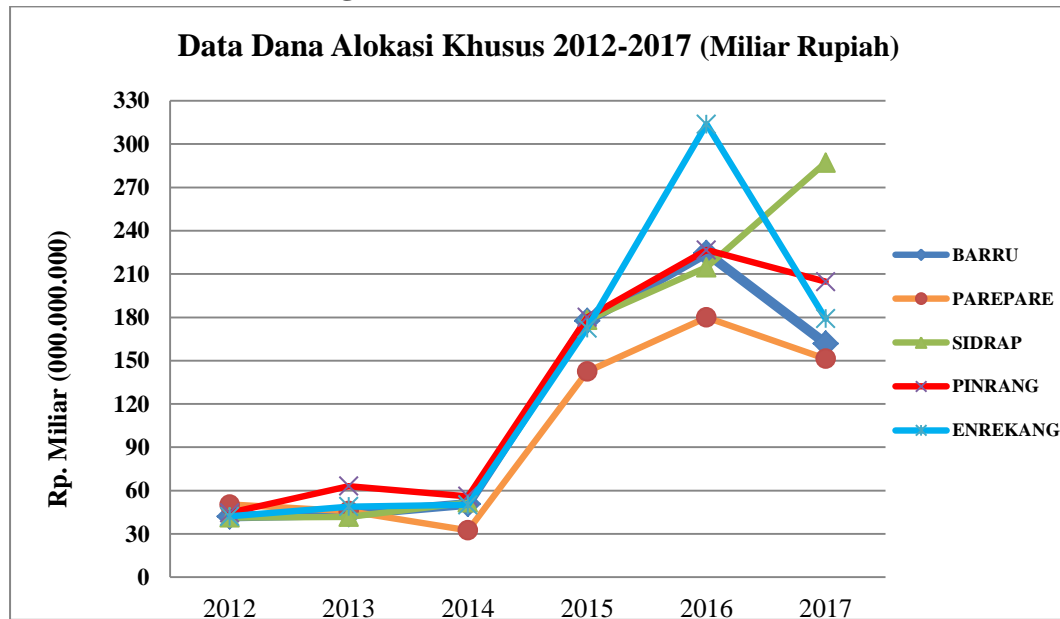


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan 2018

Berdasarkan gambar 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa dana alokasi umum di masing-masing daerah tersebut mengalami tren positif yang sama setiap tahunnya. Dana alokasi umum tidak mengalami peningkatan yang signifikan disemua daerah tetapi memiliki nilai yang masih cukup tinggi.

Sedangkan untuk melihat perkembangan seberapa banyak transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.3 Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan 2018

Berdasarkan gambar 1.3 terlihat bahwa seluruh daerah AJATAPPARENG terjadi fluktuatif cenderung meningkat. Tetapi pada tahun 2015-2017 terjadi peningkatan di masing-masing daerah tersebut. Sedangkan tahun 2012-2014 rata-rata kelima daerah tersebut mengalami kenaikan tapi tidak signifikan hanya daerah Kota Parepare saja yang mengalami penurunan pada tahun 2014.

Berdasarkan dari ketiga grafik di atas, menunjukkan bahwa kelima daerah tersebut ternyata masih memiliki persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih jauh dibawah dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Hal ini mengindikasikan bahwa dana transfer masih mendominasi keuangan masing-masing daerah tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin menganalisa tentang kemampuan dan kemandirian keuangan di kelima daerah tersebut, maka dibuatlah judul dari penelitian ini **“Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah di AJATAPPARENG”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Suparmoko dalam Ratna, 2011). Hakikat dari otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan keuangan daerah agar semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat bukan hanya terkait dengan pembiayaan tetapi juga dalam hal kemampuan pengelolaan keuangan daerah.

Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi adalah bagaimana daerah dapat mengatasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hak ketergantungan fiskal untuk kebutuhan segala kegiatan pembangunan daerah (Kuncoro dalam Qomariyah, 2018).

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi atau pusat kepada tingkatan pemerintah yang ada dibawahnya atau di daerah. Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD (Sidik dalam Sumarmi, 2008). Desentralisasi fiskal sebagai ukuran untuk menunjukkan seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam memberikan kontribusi pembangunannya.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting bagaimana mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang akan menentukan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Secara sederhana keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula sebagai segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mahesah dalam Susantih, 2008).

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan. Sedangkan melihat dari sisi pengeluaran keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu membelanjakan pendapatan yang diterima untuk selanjutnya memberikan timbal balik atas pengeluaran tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka) berdasarkan dimensi waktu, atau disebut juga data *time series* (runtut waktu). Dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah daerah AJATAPPARENG (Parepare, Barru, Pinrang, Sidrap, Enrekang). Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan daerah, yaitu pengukuran rasio kemandirian keuangan daerah, rasio kemampuan keuangan daerah (derajat desentralisasi fiskal), indikator rasio peranan (*share*) dan rasio pertumbuhan (*growth*) untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah di AJATAPPARENG maupun untuk melihat pertumbuhan komponen pendapatan daerah dalam APBD.

Data yang digunakan adalah data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Barru, Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Enrekang selama periode 2012-2017, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) periode 2012-2017 dan data Total Belanja Daerah Tahun 2012-2017.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi fiskal daerah bertujuan untuk kemandirian daerah. Sidik dalam Qomariyah (2018) menyatakan bahwa dalam era ini pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan keuangan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah harus lebih berinisiatif untuk lebih menggali potensi daerahnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada umumnya, kemandirian keuangan daerah tidak meningkat secara signifikan setelah otonomi, perolehan PAD secara absolut memang mengalami peningkatan, akan tetapi secara persentase kenaikan PAD masih lebih kecil dibandingkan dengan dana perimbangan.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu upaya ekstensifikasi baik terhadap pajak daerah maupun retribusi daerah. Hal tersebut bisa menjadi upaya alternatif untuk memperbesar PAD. Seperti memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik (Rahmi, 2013).

Berikut di bawah ini dapat kita lihat pada tabel dibawah masing-masing hasil analisis masing-masing rasio di AJATAPPARENG.

Tabel 1 Jumlah Rata-Rata Analisis Rasio di AJATAPPARENG

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Rasio Kemampuan/Rasio Kemandirian (%)	Share (%) (Rata-rata)	Growth (%) (Rata-rata)
Barru	6,46/8,45 SK/I	6,81	19,01
Parepare	13,65/20,40 K/I	14,16	19,60
Sidrap	7,60/10,94 SK/I	7,09	24,90
Pinrang	6,25/8,45 SK/I	6,34	47,79
Enrekang	5,94/7,46 SK/I	5,94	37,08

Sumber : BPS 2018 (data diolah)

Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan daerah pada tabel 5.5 di atas dapat diketahui bahwa dengan kategori tingkat kemandirian rendah sekali dan apabila dikaitkan dengan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah berada pada pola instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial) ini berarti bahwa kemampuan PAD untuk menopang pendanaan pembangunan di Kabupaten/Kota AJATAPPARENG belum mampu untuk berotonomi.

Selanjutnya daerah yang tertinggi nilai rasio kemandirian keuangan daerah yaitu Kota Parepare dengan nilai sebesar 20,40 % dan nilai ini juga belum bisa menghantarkan Kota Parepare menjadi daerah yang mandiri. Sementara itu nilai rasio terendah adalah Kabupaten Enrekang. Secara keseluruhan daerah dengan kategori Kota memiliki nilai rasio lebih besar daripada Kabupaten hal ini mengindikasikan keseluruhan daerah terutama yang paling rendah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi produktif dan adanya dukungan kualitas sumber daya manusia yang memadai sebagai penggerak roda pembangunan.

Sedangkan pada rasio tingkat kemampuan keuangan daerah pada tabel 5.5 dapat terlihat dengan jelas bahwa kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota dalam membiayai rumah tangga mereka masih sangat kurang, karena masing-masing daerah tersebut berada pada kategori sangat kurang, hal ini tentu tidak lepas dari penerimaan PAD yang sangat kecil jika dibandingkan dengan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Adapun nilai tertinggi yakni Kota Parepare dengan nilai sebesar 13,65 % dan yang terendah adalah Kabupaten Enrekang dengan nilai sebesar 5,94 %. Keseluruhan untuk dapat terus meningkatkan pendapatan daerahnya agar dikemudian hari tidak bergantung lagi dengan bantuan pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil rasio *share* tabel 5.5, secara keseluruhan nilai rata-rata yakni sebesar 8,07 % termasuk dalam kategori rendah. Adapun daerah Kota Parepare memiliki nilai tertinggi melebihi 10 % sebesar 14,16 %. Sedangkan hasil rasio *growth* menunjukkan nilai 29,68 %. Meskipun pada beberapa tahun ada beberapa daerah yang mengalami penurunan hingga lebih dari 50 %. Sedangkan pada tahun 2013, 2015, 2017 tersebut terjadinya penurunan negatif.

Dari hasil yang diperoleh dari analisis rasio *share* dan *growth* sebelumnya dan kemudian dengan menggunakan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran, maka posisi masing-masing daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1 Pengklasifikasian Peta Kemampuan Keuangan Daerah AJATAPPARENG



Sumber : BAPPENAS dalam Niken, 2017

Posisi masing-masing daerah tersebut berada pada kuadran yang sama yaitu pada kuadran II, yang menunjukkan bahwa sumbangan (*share*) PAD terhadap APBD masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi. Apabila dianalisis lebih lanjut, posisi pada kuadran II adalah kondisi belum ideal, tapi menunjukkan daerah memiliki kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD masing-masing daerah memiliki kemampuan yang cukup dalam menggali sumber-sumber PAD potensial sehingga PAD memiliki peran yang besar dalam Total Belanja. Ini berarti pemerintah daerah masing-masing masih dapat menggali potensi daerah lebih maksimal, sehingga dapat meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD.

PEMBAHASAN

Analisis Rasio Keuangan Daerah

a. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah / Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan hasil analisa sebelumnya, dengan nilai rata-rata kemampuan keuangan sebesar 8,0 % dan nilai rata-rata tertinggi Kota Parepare 13,65 % dan terendah Kabupaten Enrekang 5,94 % dapat di indikasikan bahwa Kota Parepare menjadi lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya dapat dikarenakan bahwa Kota Parepare merupakan satu-satunya daerah AJATAPPARENG yang dimana memiliki potensi sektor yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, seperti sektor perdagangan besar dan konstruksi yang dimana dalam hal ini menambah lebih banyak kontribusi PAD sehingga dapat menambah potensi daerah sebagai sumber pendapatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelima daerah tersebut masih harus mengoptimalkan maupun menggali potensi dan sumber daya yang dimiliki setiap daerah yang berpotensi untuk pemasukan PAD. Sangat kurangnya rasio kemampuan keuangan daerah dari komponen PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung kepada penerimaan yang bersumber diluar PAD, seperti dana perimbangan ataupun lain-lain penerimaan yang sah. Selain itu juga membuktikan bahwa rendahnya tingkat kemampuan keuangan pemerintah dalam membiayai pembangunan daerah masih sangat kurang. Sehingga untuk membiayai dalam hal pembangunan, maupun membiayai pelaksanaan pemerintahannya, masing-masing daerah tersebut masih sangat bergantung pada sumber keuangan selain PAD.

Selain itu dapat juga diartikan bahwa kurangnya peningkatan dalam hal partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah seperti dalam hal pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan salah satu sumber komponen penyumbang terbesar dari PAD. Hal ini terjadi karena PAD di kelima daerah tersebut masih sangat kurang dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah masing-masing daerah tersebut dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat bergantung pada sumber keuangan pemerintah yang berasal dari pemerintah pusat dalam APBD melalui dana perimbangannya.

b. Analisis Kemandirian Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Parepare dengan nilai tertinggi sebesar 20,40 % dan terendah Kabupaten Enrekang sebesar 7,76 % dengan kategori masih instruktif mengindikasikan bahwa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih sangat rendah dari sisi pembiayaannya.

Hasil penelitian ini mendukung dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Savitry (2011) dengan hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian keuangan KotavMakassar tergolong kategori instruktif dengan rata-rata 18,30 %. Maka, dapat diketahui dengan jelas bahwa ketergantungan pemerintah Kota Makassar terhadap sumber-sumber dana bantuan dari pihak ekstern masih tinggi, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, dengan komponen bantuan terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Penyesuaian.

Melihat dari sisi pertumbuhan PAD yang cenderung mengalami kenaikan positif, pemerintah daerah masing-masing cukup mampu meningkatkan penerimaan dari PAD, akan tetapi penerimaan tersebut masih jauh dari yang diharapkan sehingga belum bisa memberikan kontribusi secara nyata bagi pembangunan daerah. Tampaknya, Pendapatan Asli Daerah masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk otonomi daerah. Alasan yang dapat digunakan untuk menerangkan hal ini antara lain, pemerintah daerah dalam hal mendorong pertumbuhan PAD cenderung mengandalkan pajak dan retribusi yang didasarkan oleh peraturan yang ditetapkan. Adapun yang lain seperti BUMD masih cenderung rendah di kelima daerah tersebut. Sedangkan sumbangan yang paling besar diterima pada pendapatan daerah terserap dari Dana Transfer atau Dana Perimbangan, hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

c. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

- Analisis Peranan (*Share*)

Berdasarkan rasio peranan, selama periode penelitian terjadi fluktuatif cenderung meningkat di kelima daerah tersebut. Ini berarti adanya perbaikan kinerja dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan dananya untuk belanja pembangunan/kebutuhan publik yang terus meningkat dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Perlunya upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja daerah, mengingat bahwa proporsi perolehan PAD sangat kecil apabila dibandingkan dengan alokasi belanja daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan Kabupaten/Kota di AJATAPPARENG belum mampu untuk membiayai sendiri seluruh kebutuhan belanja daerahnya dari PAD yang dimana hanya mampu membiayai kegiatan belanja rutin dan belanja pembangunan dari sumber-sumber pendapatan daerahnya hanya sebesar 8,07 % dan sisanya lebih banyak dari subsidi pemerintah pusat berupa dana perimbangan (DAU, DAK atau Dana Bagi Hasil).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juddy (2017) yang menunjukkan bahwa kondisi belum ideal sebesar 18,792 % tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peranan besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya upaya yang serius dari pemerintah daerah untuk menggali dan mengoptimalkan potensi yang ada di daerahnya. Meskipun di sisi lain peranan transfer dana yang berasal dari pemerintah pusat masih mendominasi dalam struktur APBD Kota Manado.

- Analisis Pertumbuhan (*growth*)

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya menunjukkan bahwa rata-rata nilai *growth* sebesar 29,68 %. Nilai tersebut tergolong tinggi karenamasing-masing daerah tersebut cenderung mengalami kenaikan positif meskipun juga ada beberapa daerah yang mengalami

penurunan bahkan hingga 50 %. Selain itu, daerah dengan *growth* yang besar biasanya melakukan kebijakan peningkatan tarif pajak daerah. Peran keikutsertaan pemerintah sangatlah penting dalam sebuah pertumbuhan daerahnya terutama pertumbuhan pendapatan asli daerah, sebab pemerintah daerah yang memiliki hak untuk membuat peraturan hal apa saja yang bisa menjadi pajak daerah dalam sebuah peraturan daerah serta izin dari pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan yang ingin berinvestasi untuk dapat menambah sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2014) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa sumbangan PAD (*share*) terhadap total pendapatan daerah provinsi NTB TA 2003-2007 masih rendah, namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi. Kendati tetap terjadi peningkatan pada PAD, namun apabila dibandingkan dengan peningkatan belanja daerah, maka proporsi peningkatan PAD sangat kecil. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prayitno (2017) menunjukkan hal yang sebaliknya dimana bahwa komponen APBD Kota Semarang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini terlihat dari rasio PAD yang diikuti oleh pertumbuhan belanja pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Secara rata-rata dari tahun 2012-2017 kemampuan keuangan daerah di AJATAPPARENG berada pada nilai rasio 8,0 % yang menunjukkan pada kategori sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan di masing-masing daerah AJATAPPARENG dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Sosial masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
2. Secara rata-rata dari tahun 2012-2017 kemandirian keuangan daerah di AJATAPPARENG berada pada nilai rasio 11,20 % dengan kategori instruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah masing-masing terhadap dana alokasi dari pemerintah pusat/ pemerintah provinsi masih sangat tinggi. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa dana alokasi yang bersumber dari pemerintah pusat/provinsi menjadi dominan dalam mengelola pemerintahan di daerah AJATAPPARENG.
3. Pada analisis kemampuan keuangan daerah dengan hasil perhitungan nilai *share* sebesar 8,07 % dan nilai *growth* sebesar 29,68 % menunjukkan bahwa nilai *share* tergolong rendah sedangkan nilai *growth* tergolong tinggi. Sedangkan dengan menggunakan peta analisis kemampuan keuangan daerah menggunakan metode kuadran, menunjukkan bahwa masing-masing daerah tersebut berada pada posisi kuadran II yang menunjukkan sumbangan (*share*) PAD terhadap APBD masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi.

SARAN

1. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya, melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis komoditi unggulan daerah, dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

2. Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor baik lokal maupun asing guna menanamkan modalnya di daerah masing-masing sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatnya PDRB.
3. Pemerintah lebih mengupayakan untuk meningkatkan PAD dengan cara meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi karena pajak dan retribusi daerah merupakan komponen utama PAD dan perlunya juga melakukan pengawasan dan pengendalian kepada aparatur daerah untuk mengatasi penyimpangan dalam pemungutan pajak dan retribusi tersebut.
4. Memacu pengembangan BUMD yang dapat meningkatkan PAD.
5. Masing-masing daerah di AJATAPPARENG harus meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya terutama dalam pengoptimalan sumber pendapatan yang telah ada di kelima kota dan kabupaten tersebut. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor potensi daerah yang di dominasi oleh daerah-daerah diatas yang bisa lebih dioptimalkan.
6. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan melakukan perluasan tempat dan waktu penelitian, serta menggunakan alat pengukuran rasio lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Karianga, Hendra. 2013. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nadir, Sakinah. 2013. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. E-Journal (Vol.1, No.1 Tahun 2013)*.
- Pilat, Juddy Julian. Morasa, Jenny. 2017. *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015*.
- Prayitno, Budi. 2017. *Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Semarang dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2013-2017*.
- Qomariyah, Siti Nur. 2018. *Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Jombang. E-Journal (Vol.2 No.1 Mei)*.
- Rahmi, Ade. 2013. *Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah*. Artikel Ilmiah.
- Ratna, Sholikhah. 2011. *Analisis Kemampuan Kemandiriian Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000-2009*. Skripsi.
- Savitry, Ermhita et. al, 2011. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 di Kota Makassar*.
- Suandi, Irmal. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi.
- Sumarmi, Saptaningsih. 2008. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Provinsi*.
- Susantih, Heny dan Yulia Saftiana. 2008. *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatera bagian Selatan*.

Susanto, Hery. 2014. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat*.